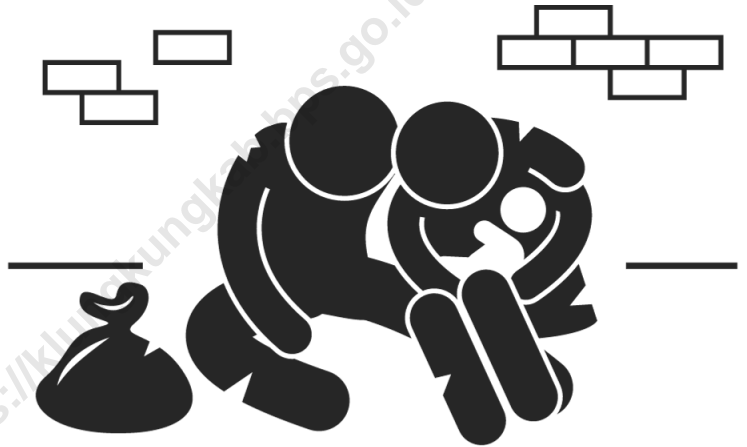


ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN KLUNGKUNG 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Katalog: 3205028.5105

ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN KLUNGKUNG 2023

<https://klungkungkab.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

ANANLISI KEMISKINAN KABUPATEN KLUNGKUNG 2023

Katalog	: 3205028.5105
ISSN	: -
Nomor Publikasi	: 51050.2322
Ukuran Buku	: 14,81 cm x 21,01 cm
Jumlah Halaman	: xi + 28 halaman
Penyusun Naskah	: BPS Kabupaten Klungkung
Penyunting	: BPS Kabupaten Klungkung
Pembuat Kover	: BPS Kabupaten Klungkung
Penerbit	: ©BPS Kabupaten Klungkung
Dicetak Oleh	: BPS Kabupaten Klungkung
Sumber Ilustrasi	: www.canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Analisis Kemiskinan Kabupaten Klungkung 2023

Pengarah:

Ir. Ni Putu Minarni S., M.M.A

Penanggung Jawab:

Made Sukma Hartania, SST

Penyunting:

Made Sukma Hartania, SST

Penulis Naskah:

Amelia Syahadati, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Amelia Syahadati, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Anak Agung Ketut Agung Dharma Putra, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu target utama dalam *Sustainable Deveelopment Goals* (SDGs). Kemiskinan dalam banyak wajahnya (*multi-faceted*) dianggap sebagai sebab dan dampak terhambatnya kemajuan sebuah bangsa.

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan masih didasarkan pada ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar sesuai dengan nilai ekonomi yang disesuaikan di masing-masing wilayah. Dari ukuran ini kemudian didefinisikan mengenai berbagai indikator kemiskinan.

Publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 merupakan publikasi pertama yang membahas kemiskinan di Kabupaten Klungkung secara khusus. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Klungkung, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Klungkung



Ir. Ni Putu Minarni S., M.M.A.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
I. 1 Sekilas Tentang Kemiskinan	3
I. 2 Konsep Definisi	7
I. 3 Cakupan, Metode dan Pengolahan ...	9
I. 4 Penghitungan Indikator Kemiskinan	10
Bab II Analisis	15

<https://klungkungkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah (000 Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung, 2010 – 2023 ..	18
Grafik 2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Bali, Tahun 2023	19
Grafik 2.3 Penambahan dan Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung, 2011 – 2023	20
Grafik 2.4 Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2023 ...	21
Grafik 2.5 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali, 2012 – 2023	22
Grafik 2.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, 2023	23
Grafik 2.7 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung, 2013 – 2023	25
Grafik 2.8 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2023	26

Grafik 2.9 Rasio Konsumsi Terhadap GK Penduduk Miskin Klungkung, 2013 – 2023	27
Grafik 2.10 Minimum Cost for Poverty Alleviation (MCPA) Penduduk Miskin Klungkung, 2013-2023	28

<https://klungkungkab.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

<http://www.klungkungkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Sekilas Tentang Kemiskinan

Martin Ravallion pernah menulis dalam bukunya bahwa konsep kemiskinan sudah diperkenalkan Confusius sejak 500 tahun sebelum masehi.¹ Kemiskinan digolongkan ke dalam enam bencana besar yang harus dihindari oleh manusia.² Akan tetapi pemikiran ini tidak sampai ke barat karena pengaruh Dinasti Chou tidak luas dan relatif hanya sebatas Asia. Gagasan mengenai kemiskinan yang menjangkau Eropa baru terjadi sekitar 150 tahun kemudian, ketika Aristoteles memperkenalkan bahwa kemiskinan sangat berhubungan dengan perbudakan.

Buah pikiran ini baru ditinjau kembali pada era merkantilisme sekitar abad tujuh belas. Pada masa ini, fokus mengenai kemiskinan dimulai dari kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan perbudakan dan kolonial. Era merkantilisme ditandai dengan perdagangan antar wilayah

¹ Martin Ravallion dalam bukunya yang berjudul “The Economics of Poverty”

² Pemikiran ini dapat dilihat dari kutipan berjudul “Analects” karya Confusius

yang kemudian berujung pada kebijakan yang bertujuan untuk menekan sisi biaya input serendah mungkin termasuk di dalamnya upah buruh (budak untuk yang berasal dari pihak yang berhasil dikalahkan).

Pemikiran-pemikiran mengenai kemiskinan dan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi baru terjadi sekitar tahun 1960-an. Kala itu, data empiris menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan penduduk dunia hampir seluruhnya diakibatkan kenaikan konsumsi masyarakat yang didorong oleh meningkatnya progres kemajuan ekonomi. Dampak paling tinggi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sangat dirasakan di kelompok negara-negara pemenang perang, sementara di pihak yang kalah, progres restrukturisasi ekonomi justru berlangsung sangat lambat. Dalam keadaan serba tidak menentu, terpuruk dan dalam keadaan kalah perang inilah yang kemudian menjadi pionir bagi hubungan ekonomi Asia Timur dan Eropa Barat dengan Amerika Serikat.

Indonesia punya cerita yang berbeda. Apabila kita diminta Kita dapat membayangkan tren kemiskinan di negeri ini sebagai pendulum dengan waktu osilasi berkisar antara 20 hingga 30 tahun. Dari tahun 1945 yang mengalami perbaikan, kinerja pengentasan kemiskinan kemudian jatuh kembali di tahun 1965 yang ditandai dengan pergantian rezim. Perbaikan di tahun 1971 harus mengalami turbulensi di tahun 1998.

Harapan yang cerah akan terjadinya *zero poverty* yang dicanangkan di awal milenium harus tersendat karena dampak pandemi di tahun 2020.

Jan Luitten Von Zanden dalam suatu karya mengenai 200 tahun sejarah Indonesia pernah menulis bahwa penghitungan mengenai input dan output ekonomi di Indonesia sudah dilakukan sejak jaman kolonial.³ Pada periode itu, Belanda telah mencatat mengenai tingkat kesejahteraan penduduk termasuk di dalamnya kesejahteraan keluarga buruh-buruh yang bekerja di perusahaan milik penjajah. Jumlah penduduk yang masih sedikit serta masih homogennya lapangan usaha kala itu membuat penghitungan dan catatan milik Belanda dapat dikategorikan sangat akurat.

Meskipun pola-pola intervensi pemerintah terhadap kemiskinan di masa itu masih dibayangi kepentingan lain seperti halnya simpati dari pribumi, akan tetapi visi kolonial terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat sudah sangat matang. Arah perbaikan tidak ditekankan pada peningkatan ekonomi melainkan merombak struktur sosial seperti misalnya, mengelompokkan masyarakat dalam strata ekonomi bertingkat sehingga penanganannya akan lebih spesifik. Sesungguhnya

³ Jan Luitten Van Zanden dalam karya penting namun tidak populer berjudul “Ekonomi Indonesia Tahun 1800 - 2010”

metode ini, entah sengaja atau tidak merupakan pengejawantahan dari ajaran milik Thomas Aquinas tentang konsep kaum marjinal.

Dewasa ini penghitungan kemiskinan sangat ditekankan pada pemenuhan kebutuhan minimum. Cikal bakal penghitungan di Indonesia dirintis oleh Sayogyo pada tahun 1971 yang menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik pertama kali mempublikasikan hasil penghitungannya pada tahun 1984 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1976 – 1981. Sampai dengan 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional. Baru pada tahun 1990 dapat dilakukan pada tingkat provinsi, meskipun untuk beberapa provinsi kecil dilakukan penggabungan. Selanjutnya sejak tahun 1993 informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi secara keseluruhan.

Dari model penghitungan inilah konsep kunci mengenai Garis Kemiskinan (GK) diperkenalkan. Jejak literatur menunjukkan bahwa penghitungan mengenai garis kemiskinan sudah ada sejak awal abad ke-20 hanya baru dikembangkan kemudian di tahun 1960an. Hanya saja di Indonesia dan juga di banyak negara koneksi antara GK dalam

mengkategorikan penduduk miskin terbatas pada *gap* antara konsumsi penduduk miskin dan kebutuhan minimum untuk hidup layak dan sementara belum mampu mencatat *gap* antara pendapatan dengan kebutuhan minimum.⁴ Di Indonesia, garis kemiskinan ini kemudian yang menjadi dasar penentuan penentuan penduduk miskin di tingkat makro.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

I.2 Konsep Definisi

1. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

⁴ Stiglitz dalam buku bagusya yang berjudul “The Price of Inequality”

2. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
4. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
5. Persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang konsumsinya dibawah garis kemiskinan dibagi dengan keseluruhan penduduk di suatu wilayah.

6. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
7. Indeks keparahan kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

I.3 Cakupan, Metode dan Pengolahan

1. Cakupan Susenas Maret mencakup 580 rumah tangga, sedangkan yang tersebar dalam 58 blok sensus. Level estimasi Susenas Maret sampai dengan kabupaten/kota, sedangkan level estimasi Susenas September sampai dengan provinsi. Sampel dipilih secara acak dan tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Klungkung.
2. Metode pengumpulan data melalui metode wawancara terhadap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Periode referensi untuk konsumsi makanan adalah seminggu sebelum pencacahan. Sementara itu, periode referensi untuk konsumsi non-

makanan adalah sebulan yang lalu, setahun yang lalu maupun keduanya.

3. Pengolahan dokumen Susenas terdiri dari kegiatan *receiving-batching*, *editing-coding*, *entry*, kompilasi data, dan tabulasi. Kegiatan *receiving-batching*, *editing-coding*, dan *entry* dilakukan sepenuhnya di BPS Kabupaten/Kota. Selanjutnya, kegiatan kompilasi data dan tabulasi dilakukan di BPS Provinsi dan BPS Pusat.

I.4 Penghitungan Indikator Kemiskinan

Penghitungan indikator kemiskinan menggunakan dasar penghitungan dari indeks FGT atau indeks Foster–Greer–Thorbecke. Indeks ini dipopulerkan pada tahun 1984 oleh Erik Thorbecke, Joel Greer, and James Foster.

Secara matematis indeks ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$FGT_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^H \left(\frac{Z - Y_i}{Z} \right)^{\alpha}$$

Keterangan :

Z = Garis kemiskinan

N = Populasi

- H = Populasi penduduk miskin
Y_i = Konsumsi penduduk miskin
 α = parameter

Dengan menggunakan parameter α di berbagai tingkatan akan terbentuk indeks yang berbeda sesuai dengan keperluannya. Nilai $\alpha = 0$ akan terbentuk nilai P0 atau *headcount index* atau persentase penduduk miskin.

Dengan menggunakan $\alpha = 1$ akan terbentuk nilai P1 atau indeks kedalaman kemiskinan. Di lain pihak dengan menggunakan $\alpha = 2$ akan didapatkan nilai P2 atau indeks keparahan kemiskinan. Indeks yang terbentuk ini dapat dimodifikasi menjadi *absolute monetary value of poverty gap* dan rasio antara indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan persentase penduduk miskin (head count ratio). Pemilihan *absolute monetary value of poverty gap* didasarkan pada literatur yang disusun oleh Martin Ravallion (1992) yang dikutip oleh Michael Shea (1997).

Ravallion menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan atau poverty gap index dapat didekomposisi menjadi variabel yaitu anggaran minimum untuk mengentaskan kemiskinan berdasarkan target (*absolute monetary value of poverty gap* atau *minimum cost of eliminating poverty*) dibagi dengan anggaran maksimum untuk mengentaskan kemiskinan (*maximum cost of eliminating*

poverty without targetting). *Absolute monetary value* menunjukkan biaya teoretis minimum yang diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan sehingga analisis konvergensi pada indikator ini akan mampu melihat wilayah-wilayah yang memiliki pergerakan searah pola penganggaran minimumnya. *Minimum cost for poverty alleviation* (MPA) dapat ditulis sebagai $P_1 \cdot Z \cdot N$.

Indikator kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dengan persentase penduduk miskin (headcount index). Berdasarkan penghitungan matematis rasio kedua indeks ini dapat menunjukkan simpangan dari rata-rata konsumsi terhadap garis kemiskinan. Rasio ini juga akan mengeliminasi faktor jumlah penduduk dan menggantinya dengan jumlah penduduk miskin. Secara matematis indikator ini dapat ditulis sebagai P_1/P_0 atau $1 - \bar{Y}/Z$. Dengan \bar{Y} adalah konsumsi rata-rata penduduk miskin.⁵ Indikator ini digunakan untuk melihat perbandingan jarak antara rata-rata konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai ini maka konsumsi penduduk miskin relatif mendekati garis kemiskinan.

⁵ Penjelasan mengenai penurunan kedua indikator ini akan disampaikan pada bagian lampiran.

Indikator ini berbeda dengan indeks kedalaman yang menggunakan pembagi penduduk secara keseluruhan.

<https://klungkungkab.bps.go.id>

2

<https://klungkungkab.bps.go.id>

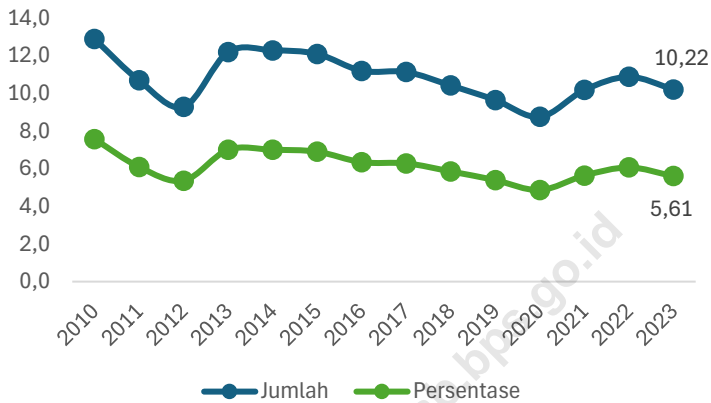
ANALISIS

BAB II

ANALISIS

Kemiskinan di level mikro individu merupakan permasalahan yang bersifat personal terkait dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar minimum kebutuhannya. Permasalahan kemiskinan di level makro yang disajikan melalui berbagai indikatornya seringkali tidak memenuhi kebutuhan informasi mengenai kemiskinan secara keseluruhan.

Selain berhubungan dengan pengangguran, kesejahteraan juga seringkali dihubungkan dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Penentuan penduduk miskin beserta indikator turunannya ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

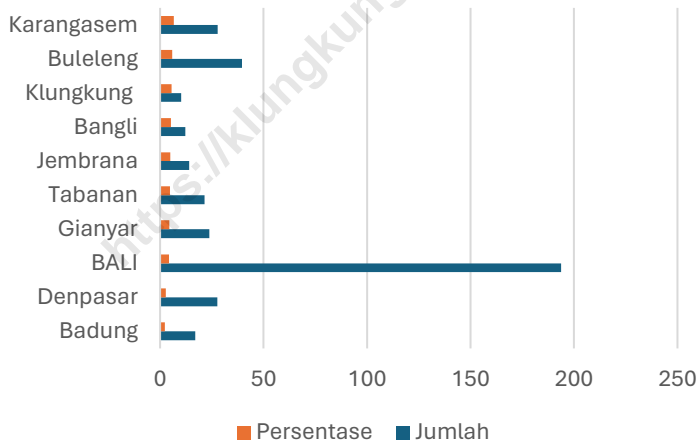


Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah (000 Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung, 2010 - 2023

Pada bulan Maret tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 10,22 ribu jiwa atau menurun sekitar 0,67 ribu jiwa dibandingkan dengan 10,89 ribu penduduk miskin di tahun 2022. Apabila dipadankan dengan jumlah penduduk miskin di Bali, konsentrasi penduduk miskin di Klungkung mencapai 5,27 persen. Konsentrasi ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,29 persen. Jumlah penduduk miskin di Bali di tahun 2023 tercatat mencapai 193,78 ribu jiwa atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 205,68 ribu jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat mencapai 193,78 ribu jiwa di tahun 2023. Jumlah ini sekitar

4,25 persen dibandingkan dengan penduduk Bali secara keseluruhan. Pada tahun ini tercatat penduduk miskin terbesar dari sisi jumlah tercatat di Buleleng dengan jumlah mencapai 39,52 ribu jiwa. Di lain pihak dari sisi persentase tercatat persentase penduduk miskin terbesar tercatat di Karangasem yang mencapai 6,56 persen. Data ini juga menunjukkan bahwa dari sisi jumlah, penduduk miskin di Klungkung menempati posisi paling rendah meskipun dari sisi persentase tercatat di tiga teratas setelah Karangasem dan Buleleng.

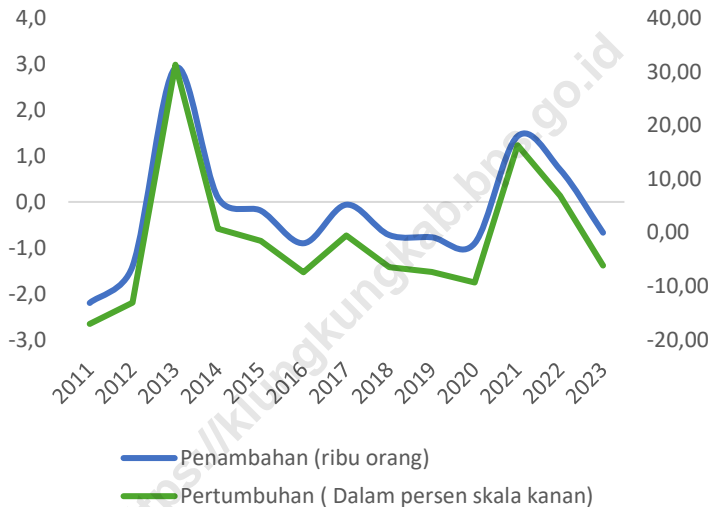


Grafik 2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/kota di Bali, Tahun 2023

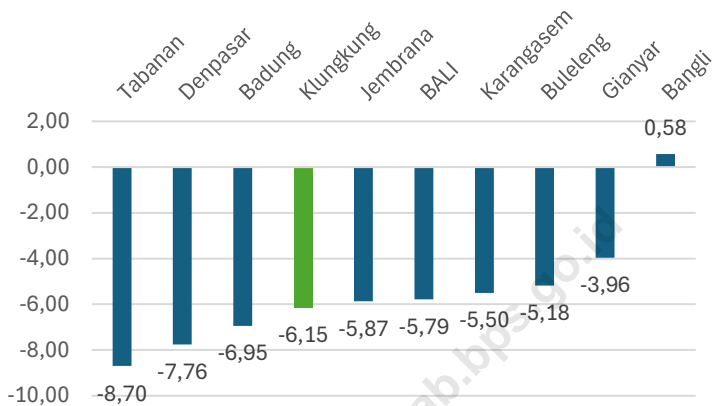
Penurunan ini adalah tren positif sejak kenaikan di tahun 2021. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 700 orang atau setara -6,15 persen. Besaran ini menunjukkan

pola penanganan kemiskinan atau *poverty alleviation* yang positif pasca pandemi COVID-19.

Grafik 2.3 Penambahan dan Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung, 2011-2023

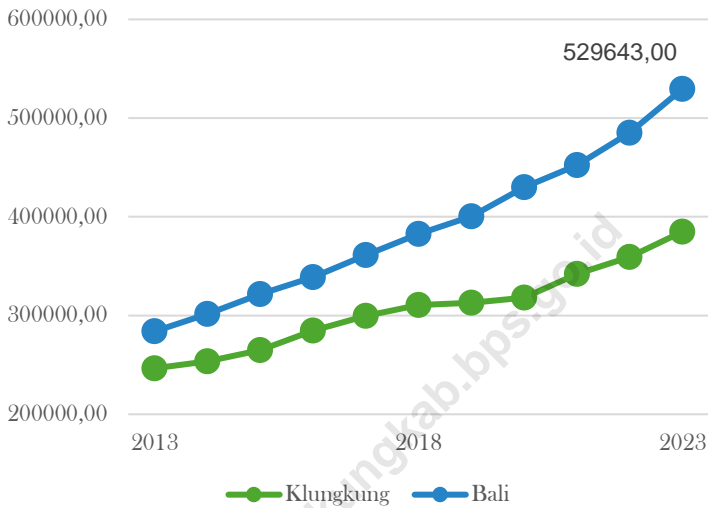


Penurunan tertinggi penduduk miskin tercatat di Kabupaten Tabanan yang turun hingga 8,70 persen. Selain Tabanan, Badung dan Kota Denpasar tercatat mengalami penurunan yang paling tinggi yang masing-masing mencapai -6,95 dan -7,76 persen. Penduduk miskin di Bali tercatat mengalami penurunan -5,79 persen di tahun 2023 ini. Di tahun 2023, hanya Bangli yang penduduk miskinnya tumbuh positif 0,58 persen.



Grafik 2.4 Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten/kota di Bali Tahun 2023

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung di tahun 2022 tercatat mencapai 384.983 rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan dengan GK Provinsi Bali yang mencapai 529.643 rupiah. Gap GK antara Klungkung dan Bali terlihat semakin melebar hal ini menunjukkan perbedaan daya beli kelompok miskin yang semakin tinggi antara Klungkung dan Bali secara umum. GK Klungkung juga tercatat paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Bali yang mengindikasikan daya beli penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan wilayah lain di Bali.

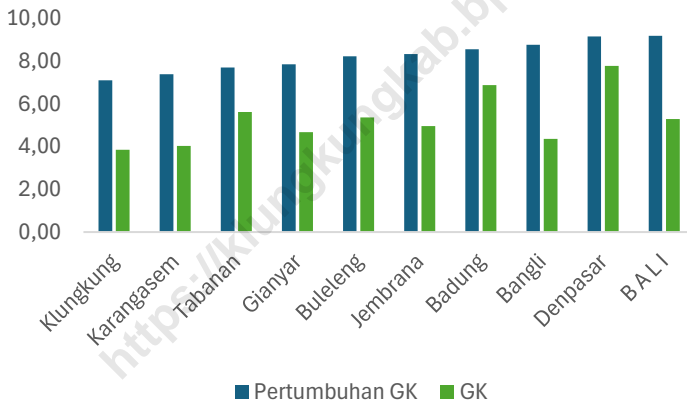


Grafik 2.5 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali, 2012-2023

GK Kabupaten Klungkung Tercatat meningkat 25.568 rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan ini setara dengan pertumbuhan GK sebesar 7,11 persen. Kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahunan yang berada pada kisaran di bawah 5 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan biaya hidup minimum yang melebihi kenaikan harga secara keseluruhan.

Secara kewilayahan tercatat pertumbuhan GK tertinggi tercatat di tingkat provinsi yang mencapai 9,19 persen. Persentase ini hampir sama dengan Denpasar yang tumbuh

9,17. Kabupaten dengan pertumbuhan GK terendah adalah Klungkung yang hanya tumbuh 7,11 persen. Di lain pihak perbandingan GK antar wilayah terlihat masih cukup mencolok. Sebagai contoh GK Denpasar yang mencapai 0,78 juta Rupiah lebih dari dua kali GK Klungkung yang mencapai 0,38 juta Rupiah.

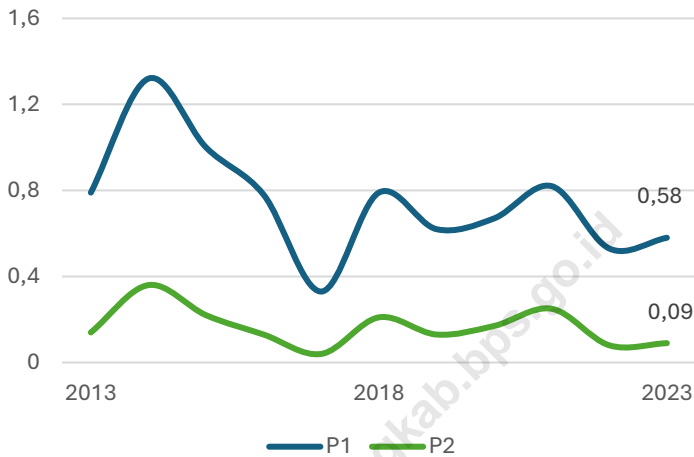


Grafik 2.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2023

Indeks keparahan kemiskinan adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang

tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

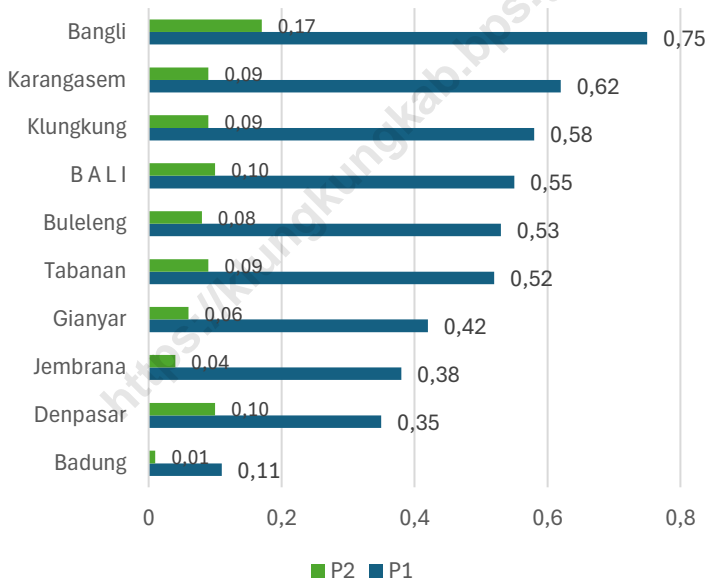
Sementara itu indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil *nilai poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.



Grafik 2.7 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung, 2013 - 2023

Kenaikan Garis Kemiskinan setidaknya berdampak pada indeks kedalaman kemiskinan (P1). Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 0,53 menjadi yang artinya gap pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan semakin meningkat. Dengan kata lain kondisi daya beli penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan di tahun 2023 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,08 ke 0,09 di tahun 2023. Penurunan pada kedua indikator ini menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin mengalami kenaikan, akan tetapi kesenjangan kesejahteraan antar penduduk miskin

semakin rendah. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Klungkung memiliki pola konsumsi yang sama dengan variasi tingkat konsumsi yang tidak tinggi. Dengan kata lain penduduk miskin dan penyebabnya dapat lebih teridentifikasi di tahun 2022 ini.

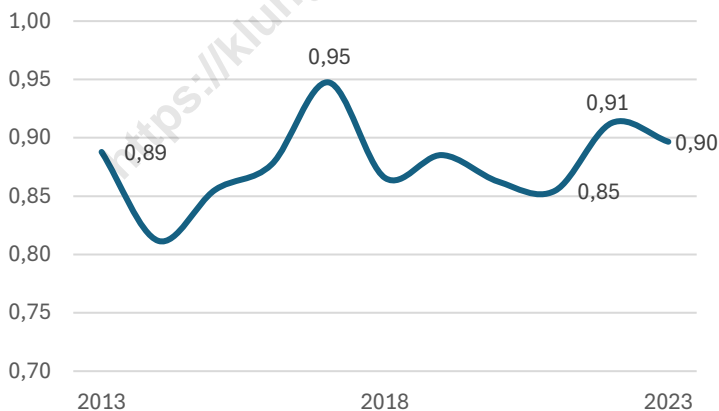


Grafik 2.8 Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Kabupaten/kota di Bali Tahun 2023

Indeks kedalaman tertinggi tercatat di Kabupaten Bangli yang mencapai 0,75 poin. Sementara yang terendah adalah Badung yang hanya 0,11 poin. Di saat yang sama indeks

keparahan kemiskinan tertinggi juga tercatat di Bangli yang mencapai 0,17 sementara yang terendah mencapai 0,01 di Kabupaten Badung.

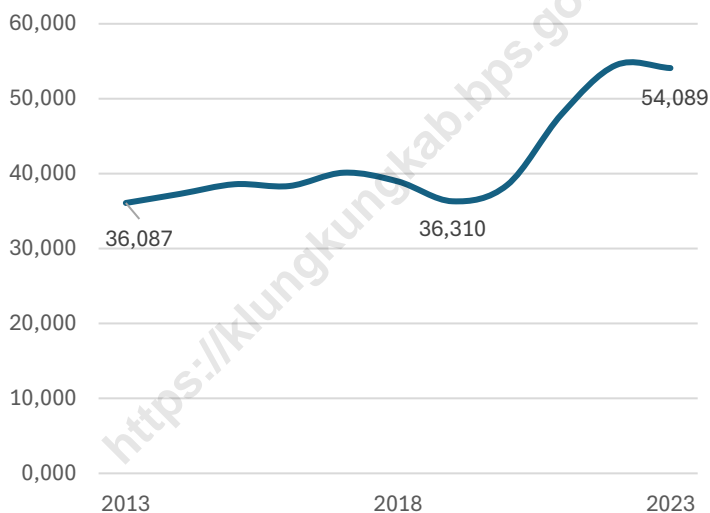
Hasil pengolahan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi penduduk miskin di tahun 2023 mencapai 90 persen GK di Kabupaten Klungkung. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 91 persen. Meskipun demikian nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi. Titik tertinggi rata-rata rasio konsumsi tercatat di tahun 2017 yang mencapai 95 persen.



Grafik 2.9 Rasio Konsumsi terhadap GK Penduduk Miskin Klungkung Tahun 2013 sampai 2023

Penurunan pada rasio konsumsi di sisi lain ternyata diikuti oleh penurunan pada *minimum cost for poverty*

alleviation (MCPA) di Kabupaten Klungkung. Penurunan MCPA tercatat dari 54,48 milyar Rupiah di tahun 2022 menjadi 54,08 milyar Rupiah. Kenaikan MCPA dibandingkan dengan sebelum tahun 2021 terjadi karena perbedaan *base* penduduk hasil proyeksi sensus penduduk.



Grafik 2.10 *Minimum Cost for Poverty Alleviation* (MCPA) Penduduk Miskin Klungkung Tahun 2013 sampai 2023

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Jl. Raya Besakir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung 80751
Tlp. (0366) 21180 Fax. (0366) 24242
E-mail: bps5105@bps.go.id
Homepage: <https://klungkungkab.bps.go.id>

